

## **RINGKASAN**

**FARIZKY ARIFIN SIREGAR**

**NIM: 200510298**

**Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim  
Dalam Putusan Hakim Terhadap  
Tindak Pidana Anak Sebagai Korban  
Eksplotasi Melalui Aplikasi Tiktok  
Dipanti Asuhan (Studi Putusan No.  
148/Pid.Sus/2024/ PN.Mdn)  
Dr. Malahayati, S.H., LL.M dan Dr.  
Budi Bahreisy. S.H.. M.H.**

Penggunaan media sosial seperti Tiktok pada era digital ini tidak mudah dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Penggunaan Tiktok sendiri membawa keuntungan bagi penggunanya karena setiap individu membagikan konten di platform ini, hak cipta konten tersebut secara otomatis menjadi milik individu yang mengunggahnya. Hal ini pula yang menciptakan suatu bentuk pelanggaran pidana baru yaitu berkembangnya konten yang mengeksploitasi anak dengan dasar atas keuntungan ekonomi.

Penelitian ini sendiri bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi asas keadilan terhadap pelaku kejahatan eksploitasi anak di Panti Asuhan serta memahami dan menelaah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban eksploitasi di Panti Asuhan. Penelitian ini sendiri menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan pendekatan yang menekankan pada analisis masalah hukum melalui doktrin atau perspektif hukum yang telah mapan.

Berdasarkan Hasil Penelitian bahwa dalam Penerapan asas keadilan terhadap pelaku kejahatan eksploitasi anak yang dilakukan di Panti Asuhan Olayama Raya didalam Putusan No.148/Pid.Sus/2024/PN.Mdn sendiri tidak dianggap tidak mencerminkan asas keadilan secara substansial, mengingat dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh anak-anak sebagai korban oleh karena itu didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit melarang segala bentuk eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak. Serta dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan sebuah dasar perlindungan hukum kepada anak korban kejahatan di ranah digital.

Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan investigasi dan penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi pada anak, termasuk membentuk satuan tugas terpadu perlindungan anak dan kejahatan siber. Aparat sendiri perlu dilatih penanganan ramah anak yang sensitif terhadap trauma yang dialami oleh korban dan sesuai dengan dampak psikologis korban serta untuk pemerintah agar memperkuat kebijakan pencegahan dan memberikan pendidikan publik tentang eksploitasi pada anak terutama di ranah digital.

**KATA KUNCI :** *TINDAK PIDANA, ASAS KEADILAN, EKSPLOITASI ANAK, PANTI ASUHAN, PERLINDUNGAN ANAK.*

## SUMMARY

**FARIZKY ARIFIN SIREGAR**

**NIM: 200510298**

***The Principle of Justice in Judicial Rulings on Criminal Offenses Involving Child Victims of Exploitation via TikTok in Orphanages (A Case Study of Decision No. 148/Pid.Sus/2024/PN. Mdn)***

***Dr. Malahayati, S.H., LL.M and Dr. Budi Bahreisy, S.H., M.H.***

*The utilization of social media platforms, such as TikTok, in the contemporary digital era has become inseparable from modern societal life. While TikTok provides advantages to its users—since the copyright of any uploaded content automatically belongs to the individual creator—it simultaneously gives rise to emerging forms of criminal conduct, notably the proliferation of child exploitation content motivated by economic gain.*

*This research seeks to examine and critically analyze the implementation of the principle of justice with regard to perpetrators of child exploitation within orphanages, while also exploring and assessing the legal protections afforded to children as victims of exploitation in such institutions. Employing a normative juridical research method, the study adopts an approach that emphasizes the analysis of legal problems through established doctrines and authoritative legal perspectives.*

*The findings indicate that the application of the principle of justice in cases of child exploitation at the Olayama Raya Orphanage, as adjudicated in Court Decision No.148/Pid.Sus/2024/PN.Mdn, fails to substantively embody justice, given the profound psychological and social consequences experienced by child victims. In this regard, Law No.35 of 2014 on Child Protection explicitly prohibits all forms of economic and sexual exploitation of children. Furthermore, Law No.11 of 2008 on Electronic Information and Transactions provides a legal framework for ensuring the protection of children as victims of crimes within the digital sphere.*

*Accordingly, it is recommended that law enforcement authorities enhance their investigative and enforcement capacities in addressing child exploitation cases, including the establishment of an integrated task force on child protection and cybercrime. Law enforcement officials should receive training in child-sensitive procedures that are responsive to trauma and psychological harm experienced by victims. Additionally, the government should reinforce preventive policies and promote public education on child exploitation, particularly in the digital context.*

***Keywords:*** Criminal Offense, Principle of Justice, Child Exploitation, Orphanage, Child Protection.